

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaporan keuangan suatu hal familiar terdengar terutama jika didalam organisasi pengelolaan penting dilakukan baik yang berbasis laba ataupun nonlaba. Akuntansi tidak terlepas dari hasil laporan keuangan, untuk mencapai pengelolaan keuangan yang handal maka diperlukan pengetahuan, keterampilan, keahlian tentunya dibarengi dengan pengalaman yang cukup. Setiap organisasi membutuhkan pemimpin, pengurus dan penanggungjawab untuk mencapai tujuan organisasi bersama dengan para anggota. Dengan adanya pelaporan yang handal maka pihak eksternal dan internal yang berhubungan dengan organisasi akan saling percaya. Kepercayaan adalah salah satu kunci agar suatu organisasi dapat terus berkembang. Kepercayaan akan tumbuh jika adanya suatu kejujuran dan keterbukaan antar anggota yang ada didalam entitas. Akuntabilitas merupakan suatu konsep yang berkembang terus menerus yang biasanya digunakan untuk citra suatu perusahaan atau entitas yang menjalankannya sehingga erat kaitannya dengan transparansi dan kepercayaan (Rusdiana & Nasihudin, 2018). Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi yaitu hal yang dituntut oleh *stakeholder*. Akuntabilitas adalah salah satu hal dalam pelaksanaan *Good Governance* dan menjadi indikator penilaian terhadap kinerja organisasi. Pengelolaan yang transparan maka sebuah organisasi tersebut mendapatkan kepercayaan dari pihak internal dan eksternal.

Organisasi nonlaba berbeda dengan organisasi bisnis, walaupun bukan untuk mencari laba tapi masih bersinggungan dengan keuangan terutama dalam pelaporan keuangan, setiap anggota perlu mengetahui akuntabilitas transparansi dari suatu laporan keuangan yang disajikan. Hal diatas merupakan hal yang paling utama yang dituntut dalam pengelolaan keuangan organisasi yaitu hal yang dituntut oleh pihak eksternal yaitu *stakeholder*. Karakteristik organisasi nonlaba seperti yang kita ketahui bahwa sumberdaya atau dana sebagian besar dari anggota atau pihak lain yang siap memberikan bantuan dan atau sumbangan yang murni tidak adanya harapan pengembalian dana setimpal atau sebanding dengan sumber daya yang diberikannya (DSAK, 1998).

Organisasi nonlaba punya aturan khusus yang dikeluarkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tahun 1997 dalam PSAK 45 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). PSAK 45 terutama mengatur bagaimana Organisasi nonlaba menyusun laporan keuangannya. Sejak 1997 diatur oleh PSAK 45 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yaitu prosedur atau peraturan dalam penyusunan laporan pada keuangan organisasi nonlaba yang dibuat DSAK IAI. Lebih tepatnya tanggal 11 April tahun 2019 dicabutnya PSAK 45 dengan penggantinya ISAK 35 (Interpretasi standar akuntansi keuangan) yang tercantum di PPSAK 13.¹ Organisasi nonlaba diartikan suatu entitas yang pemiliknya bisa pemerintah ataupun swasta yang sumberdaya berasal dari penyumbang dan tidak untuk mendapatkan keuntungan yang tidak mengharapakan dana yang mereka berikan kembali sebagai imbalan dalam melakukan sumbangan dan didalam organisasi nonlaba juga memerlukan laporan keuangan yang disajikan

¹DSAK, *Ppsak 13 Pencabutan PSAK 45: Pelaporan keuangan entitas nirlaba* (Jakarta: Ikatan akuntan indonesia, 2019).

guna sebagai bahan pertanggungjawaban bagi semua pihak yang memerlukan. Ada beberapa perbedaan ISAK 35 dan PSAK 45 khususnya 1). Terjemahan dari “ *not for Profit*” diterjemahkan menjadi “nirlaba” di PSAK 45 kemudian diubah menjadi nonlaba oleh DSAK IAI dalam ISAK 35 berdasarkan pada tujuan utama tidak untuk keuntungan semata tapi bukan juga tidak ada laba yang dihasilkan. 2). Ruang lingkup ISAK 35 mengatur tentang bagaimana disajikannya laporan terkait keuangan, sehingga peraturan pembukuan lainnya berbasis nonlaba acuan pada SAK atau SAK ETAP yang memiliki korelevanan. 3). Dan yang terakhir perbedaannya ditemukan dalam substansi, teknik penyusunan setiap laporan terhadap keuangan (Pratama, 2020). Dalam Draf ISAK 35 oleh DSAK (IAI:2018) fungsi dari adanya ISAK 35 bukan hanya untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah tetapi ada beberapa hal yang diatur agar penggunaan terhadap sumberdaya yang diberikan dengan kepercayaan kepada pengelola dapat dipertanggungjawabkan, dari hasil laporan keuangan serta kinerja organisasi nonlaba pengguna yang berhak dapat mengambil keputusan.

Vihara adalah tempat ibadah untuk umat Buddha/Buddhis sebagai tempat untuk merayakan dan melakukan upacara penghormatan untuk Tuhan Buddha, dulunya Vihara merupakan tempat tinggal *ordo monastic* yaitu *Bhikku*, *Bhikkuni*, *Samanera* dan *Samaneri*. Vihara bukan saja sebagai tempat beribadah tapi juga sebagai tempat untuk melakukan kebaikan bagi penganut agama Buddha khususnya di Indonesia. Fungsi dari Vihara itu sendiri ada berbagai macam diantaranya ;1).Sebagai tempat tinggal bagi Bikkhu, Bikkhuni, Samanera, Samaneri. 2).Sebagai tempat untuk beribadah umat Buddha/Buddhis, 3).Sebagai sarana pendidikan moral, disiplin dan budaya sesuai dengan ajaran Buddha, 4).Sebagai tempat untuk belajar dan melaksanakan kebaikan dan kebajikan

kepada seluruh semesta, 5). Sebagai tempat untuk melaksanakan dhamma yang diajarkan dan diterapkan oleh Raja Bhumibol yaitu ada 10 ; *Dana* artinya memberikan yang berwujud dan tidak berwujud, *Sila* artinya hidup sesuai dengan aturan Buddha, *Pariccaga* artinya pengorbanan, *Ajjava* artinya kejujuran, *Maddav* artinya kelembutan dalam sopan santun dan semangat, *Tava* artinya penghematan, *Akodha* artinya kebebasan dari kemarahan, *Avihimsha* artinya tanpa kekerasan, *Khanti* artinya kesabaran, *Aviridhana* artinya teguh dalam kebenaran (Barua, 2018). 6). Wadah untuk melatih meditasi dalam usaha meningkatkan kesadaran kehidupan, 7). Sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan sosial yang bersifat keagamaan (Agama Buddha). Dalam buku yang ditulis oleh Sigit Prajoko dan Sukiman (2017:44) dengan judul “Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti” Di Vihara sendiri ada 5 (lima) moralitas yang menjadi dasar agama Buddha sebagai berikut: 1). Tidak melakukan pembunuhan, 2). Tidak Mencuri, 3). Menjauhkan diri dari hal-hal Maksiat/Asusila, 4). Tidak Berdusta atau berbohong, 5). Tidak makan dan minum yang menimbulkan ketidaksadaran diri atau mabuk.

Dalam melakukan kegiatan keagamaan di Vihara sendiri akan selalu ada pendapatan dan pengeluaran sehingga para pengurus vihara dihadapkan pada pertanggungjawaban terutama dalam pelaporan keuangan vihara. Seperti halnya pada organisasi nonlaba lainnya Vihara juga membutuhkan pengelola keuangan untuk mengalokasikan dana, membuat pencatatan baik pemasukan dan pengeluaran untuk menghasilkan informasi akuntansi yang relevan dan transparan baik kepada sesama pengurus, umat dan donator yang menyumbangkan uangnya baik untuk kegiatan umat dan pembangunan Vihara. Informasi keuangan yang sesuai dengan ISAK 35 digunakan dalam

perencanaan, pengelolaan, pelaporan keuangan serta pengendalian yang mudah dan efektif dan terpercaya. Pada umumnya, Vihara melakukan pencatatan hanya untuk penerimaan dan pengeluaran saja. Nilai ekonomi dari aset Vihara tidak diketahui karena tidak mencatat aset yang dimilikinya. Akuntabilitas belum terlaksana sebagai mana mestinya. Karena masalah tersebut maka peneliti melakukan penelitian mendalam yaitu untuk membantu Vihara dalam menyajikan dan menyusun pelaporan keuangan, seperti yang kita ketahui dalam membuat pelaporan keuangan bukanlah pekerjaan mudah dan sederhana apalagi dengan berpatokan pada standar yang telah ditetapkan. ISAK 35 adalah peraturan yang baru diterapkan untuk entitas nonlaba maka dalam penelitian ini akan membantu Vihara dalam memahami siklus akuntansi dan adaptasi standar/aturan ISAK 35 yang baru lebih mudah nantinya. Sehingga para pengelola keuangan lebih mudah dalam membuat laporan keuangan Vihara.

Tempat penelitian diadakan di Vihara Buddha Ramsi tepatnya berada di jalan Delitua Pama, Deli tua, kecamatan Deli tua, kabupaten Deli serdang, Sumatera Utara (SUMUT). Vihara Buddha Ramsi merupakan salah satu organisasi sosial dan nonlaba yang bertujuan untuk menjalankan kebajikan dari kegiatan yang dijalankan. Keuangan memang penting dalam kemajuan organisasi, sehingga organisasi perlu membuat laporan keuangan untuk pertanggungjawaban pada semua pihak yang menyangkut Vihara Buddha Ramsi. Sejak dahulu keuangan Vihara tertutup sehingga menyebabkan penyelewengan yang terjadi dalam Vihara yang tidak diketahui oleh umat. Pada organisasi Nonlaba seperti Vihara akuntabilitas dikendalikan oleh pemimpin Vihara.

Setiap Vihara memiliki karakteristik tersendiri, begitu juga dengan Vihara Buddha Ramsi yang akan menjadi objek penelitian penulis. Vihara Buddha

Ramsi merupakan milik beberapa orang yang berbentuk Yayasan. Yayasan merupakan organisasi nirlaba yang kekayaannya terpisah tidak adanya pemilik modal terhadap anggota sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya organisasi tersebut (Kartikahadi et al., 2019). Pada Vihara Buddha Ramsi dibagi menjadi 5 bidang yaitu Bidang persatuan umat Buddha, Bidang Muda Mudi, Bidang Gelanggang Anak Buddhis, Bidang Dhamma Sekha Dhamma Mitta (pendidikan) dan Bidang sosial pagoda. Pada tiap bidang akan ada pengurus yang berbeda, maka setiap kegiatan akan dibiayai dari sumbangan baik dari pemilik yayasan ataupun umat Buddhis Vihara, baik dalam perayaan umat Buddha. Untuk akuntabilitas pelaporan dalam penelitian Tanasal et al., (2019), dengan judul “Akuntabilitas Berbasis *Metta dan Kamma*”. Dengan hasil menyatakan Akuntabilitas metta dimaknai dengan gaya kepemimpinan dengan saluran cinta yang dibarengi kasih, yang kedua *kamma* paham dalam kepercayaan serta ketaatan umat Buddhis.

Namun dengan adanya Standar yang ditetapkan oleh DSAK yaitu ISAK 35 yang masih jarang terdengar didalam masyarakat maka pada penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa teknik sederhana masih dipergunakan, kesesuaian dengan standar masih jauh dari yang tersedia oleh IAI. Dilihat dari hasil temuan Nofi lasfita dan Muslimin (2020), dengan berjudul “Penerapan ISAK No.35 Pada Organisasi Keagamaan (studi kasus Masjid Al-Mabrur Sukolilo Surabaya)”. Hasil menjelaskan yaitu pembuatan laporan terhadap keuangan masjid acuannya masih yang sederhana dalam kata mudah dan umum digunakan, dengan bercirikan uang masuk dan uang keluar. Dan disimpulkan yaitu 1). Pengelolaan masih sederhana dalam hal pencatatannya hanya berisi uang masuk dan keuluar seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. 2).

Belum ada kesesuaian laporan terhadap keuangan Masjid Al-Mabrur sesuai ISAK 35. 3). Sistem penerimaan yang didapatkan masjid diperoleh dari infaq jumat, infaq idul fitri, infaq idul adha, infaq donator dan lain lain.²

Penelitian selanjutnya yaitu oleh Sri Nelva Susanti pada tahun 2020 judulnya adalah “Analisis penerapan ISAK 35 terhadap laporan keuangan pada Yayasan MTS Al-Manar Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir”. Tujuannya adalah mengetahui kesesuaian terhadap laporan keuangan menurut ISAK 35 dan pencatatan yang dilakukan oleh Yayasan dengan berterima pada hukum menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dapat dilihat pada penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwa entitas tersebut masih menggunakan basis kas, siklus akuntansi juga masih belum dijalankan. Sama dengan penelitian sebelumnya yang membedakan penelitian yang dilakukan ini dengan sebelumnya terletak pada objeknya penelitiannya, dipenelitian sebelumnya melakukan penelitian di Yayasan (Lembaga Pendidikan) sedangkan peneliti meneliti mengenai Vihara. Dan persamaan sendiri penelitian ini berpedoman pada penyajian ISAK 35 laporan keuangan entitas.³

Penelitian selanjutnya datang dari Ayu Yolanda dengan judul “penerapan ISAK 35 tentang pelaporan keuangan organisasi nonlaba pada Masjid Nuriman Kenagarian Kumango” yang mana permasalahan tentang pelaporan keuangan yang belum sesuai dengan ISAK 35 dan tujuannya bagaimana jika ISAK 35 diterapkan menggunakan metode *Field research* dengan metode kualitatif. Dan

² Nofi Lasfita & Muslimin, “Penerapan ISAK no.35 Pada Organisasi Keagamaan Masjid Al-Mabrur Sukolilo Surabaya” 1, no.35 (2020).

³ Sri Nelva Susanti, “Analisis penerapan ISAK No.35 terhadap laporan keuangan pada yayasan MTS al-manar kecamatan Pujud kabupaten Rokan Hilir periode 2018-2019” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarifkasim Riau Pekanbaru, 2020).

hasil penelitian ini angka setiap laporan keuangan terlihat dengan jelas jika entitas tersebut menerapkan ISAK 35. Sama dengan penelitian sebelumnya yang membedakan terletak di objeknya. persamaan sendiri penelitian ini berpedoman pada penyajian ISAK 35 laporan keuangan entitas..⁴

Penelitian selanjutnya yaitu oleh Ismi Dorajatul dan kawan-kawan dengan judul “ Penerapan ISAK 35 pada Masjid Baitul Hidayah Puger Jember” dengan tujuan melihat penerapan ISAK 35 pada Laporan Keuangan Masjid, metode kualitatif dengan deskriptif yang mana hasilnya memasukkan yang didapatkan oleh masjid yaitu sebagian besar dari Infaq, pengeluaran yang belum dicatat setiap bulan, dengan pencatatan yang masih sederhana serta laporan keuangan masih laporan masjid pada umumnya.⁵

Yang membedakan bukan hanya pada objek penelitian terdahulu dengan penelitian ini tapi periode waktu penelitian, judul, isu yang memperkuat pentingnya penelitian ini dan lain sebagainya. Jika dilihat dari beberapa penelitian diatas maka kemiripan setiap penelitian yang mana setiap permasalahan didasarkan pada entitas nonlaba yang masih melakukan pencatatan yang sederhana dan belum menerapkan ISAK 35 dapat dilihat bahwa kebanyakan entitas nonlaba masih belum mengadaptasikan ISAK 35 hal ini dapat mengakibatkan penipuan, korupsi dan hal lain yang merugikan donator entitas.

Banyak kasus tentang entitas nonlaba yang menjadi dasar mengapa ISAK 35 sangat dibutuhkan bahkan entitas keagamaan sekalipun seperti Vihara. Dilansir dari berita ANTARA News (2017) bahwa polisi dan Bikhu terlibat dalam suatu

⁴Ayu Yolanda,”Penerapan ISAK 35 tentang pelaporan keuangan organisasi nonlaba pada Masjid Nur iman kenagarian kumango”(Institusi Agama Islam Negeri, 2021).

⁵ Ismi dorajatul ula, Moh. halim & Ari sita nastiti, “penerapan ISAK 35 pada masjid baitul hidayat pugur jember,” *Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan* 4, no.2 (2021):152-165.

perkelahian dikarenakan polisi hendak menangkap mantan kepala Vihara Dhammakaya yang diduga terlibat dalam kasus pencucian uang dan dengan adanya kasus tersebut membuat pemerintah Thailand harus menyelesaikan tindakan korupsi yang ada di Vihara tersebut, bahkan pemerintah mengalami kegagalan saat melakukan penangkapan terhadap Phra Dammachayo yang dituduhkan melakukan konspirasi, pencucian uang, penerimaan terhadap barang-barang curian, lahan yang diambil secara ilegal. Selain kasus diatas isu yang hangat diperbincangkan dari Kanada yang melibatkan badan amal *WE* dan perdana menteri Justin Treadeau yang ditulis oleh N, Aqilla (2020) dalam berita artikel *INTEGRITY* bahwa terjadi konflik kepentingan yang melibatkan organisasi nirlaba *WE* yang mana konflik kepentingan ini akan menimbulkan penipuan dan korupsi, perdana menteri kanada Justin Treadeau memberikan kontrak badan amal *WE* yang mana badan amal tersebut memiliki hubungan keluarga dengan dirinya. Selain isu publik yang besar tersebut di Indonesia juga terdapat banyak sekali korupsi dan isu publik lainnya membuat perlunya standar laporan keuangan. Standar yang sudah dibuat oleh DSAK untuk diadaptasi oleh entitas nonlaba termasuk keagamaan sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi individu atau lembaga yang menyumbangkan dana untuk keberlangsungan operasi Vihara. Berdasarkan kedua kasus diatas maka perlu ketegasan untuk standar laporan keuangan. Dengan di sahkannya ISAK 35 oleh DSAK memuat penyajian laporan keuangan entitas nonlaba, yang mulai tanggal 1 Januari 2020 sudah berlaku, mewajibkan entitas berbasis nonlaba dapat beradaptasi dengan aturan yang baru tersebut. Merujuk pada pemaparan yang penulis buat sebelumnya, sehingga penulis membuat judul **“Penerapan ISAK 35 Pada Pelaporan Keuangan Vihara Buddha Ramsi Deli Tua”**.

1.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini berikut batasan untuk masalah:

- 1) Penerapan laporan keuangan dengan siklus akuntansi dan penerapan ISAK 35 entitas berorientasi nonlaba pada Vihara Buddha Ramsi Deli Tua.

1.3 Rumusan Masalah

Dengan apa yang sudah dibuat serta pemaparan yang jelas di latar belakang penelitian ini dikemukakan oleh penulis, sehingga rumusan terhadap masalahnya adalah bagaimana penerapan laporan keuangan ISAK 35 pada Vihara Buddha Ramsi Deli Tua.

1.4 Tujuan Penelitian

Hal utama untuk tujuan penelitian memberikan simulasi dan adaptasi mengenai ISAK 35 agar diterapkan tanpa mengganggu akuntabilitas di Vihara Buddha Ramsi Deli Tua.

1.5 Manfaat penelitian

Peneliti mengharapkan riset ini berguna untuk:

1. Bagi entitas Publik

Bahasan dan laporan keuangan berbasis ISAK 35 dari riset ini sebagai dasar yang dapat memberikan pandangan dan pemikiran untuk entitas publik tentang penerapan ISAK 35 dalam laporan keuangan entitas sehingga dapat diterapkan kedepannya sehingga laporan keuangan lebih mudah dipahami pengguna sehingga dapat juga di pertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memakai laporan keuangan entitas publik.

2. Bagi Pengembangan Teori

Pembahasan dan hasil dari riset ini penulis berharap agar kualitas entitas lebih baik kedepannya baik yang sejenis dengan riset ini atau tidak tetapi masih memiliki orientasi nonlaba sehingga kualitas laporan keuangan lebih baik lagi.

3. Bagi pengembangan Praktik

Pada riset ini ISAK 35 belum diadaptasi dan penerapannya masih belum dijalankan dalam entitas nonlaba yang diteliti oleh penulis sehingga dengan adanya riset ini laporan keuangan entitas disesuaikan dengan standar sehingga mudah dipahami dan menghindar dari kecurangan-kecurangan mungkin di dalam entitas bisa terjadi sehingga pertanggungjawaban kepada pihak lain dapat terlaksana sebagaimana mestinya.